

BAB II

DASAR TEORI

A. Penilaian Kinerja Keuangan

1. Pengertian

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan akan menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi yang dianalisis menggunakan alat-alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan keuangan suatu organisasi yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Irham Fahmi (2011)

2. Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan menurut Jumingan (2006) adalah :

- a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
- b. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

3. Pengukuran Kinerja Keuangan

Terdapat empat pendekatan pengukuran kinerja menurut (Mahmudi, 2007) yang dapat diaplikasikan organisasi sektor publik yaitu:

a. Analisis Anggaran

Analisis anggaran adalah pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya. Hasil yang diperoleh berupa selisih lebih atau selisih kurang. Teknik ini berfokus pada kinerja input yang bersifat finansial dan data yang digunakan adalah data anggaran dan realisasi anggaran.

b. Analisis Rasio Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah mempelajari hubungan-hubungan dalam satu set laporan keuangan pada suatu saat tertentu dan kecenderungan-kecenderungan dari hubungan ini. Menurut Mahsun (2009)

c. *Balanced Scorecard*

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berbasis pada aspek finansial dan non finansial yang diterjemahkan dalam empat prespektif kinerja yaitu, prespektif finansial, prespektif kepuasa pelanggan, prespektif proses bisnis internal dan prespektif pertumbuhan/ pembelajaran.

d. Audit Kinerja

Audit Kinerja adalah pengukuran kinerja yang berdasarkan konsep *value for money* yang merupakan perluasan lingkup dari audit finansial. Indikator kinerja terdiri dari ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Pengukuran kinerja ekonomi berkaitan dengan pengukuran seberapa hemat pengeluaran

dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pengeluaran dengan anggarannya.

Efisiensi berhubungan dengan pengukuran seberapa besar daya guna anggaran dengan cara membandingkan realisasi kaitan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan. Sedangkan efektifitas berkaitan dengan seberapa tepat dalam pencapaian target dengan membandingkan output.

B. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antar data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktifitas perusahaan tersebut (Munawir, 2004).

Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2016). Sedangkan dalam Darsono dan Ashari (2005), laporan keuangan adalah informasi yang memuat tentang posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan. Laporan keuangan menunjukkan kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan menghasilkan pendapatan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Berikut ini beberapa tujuan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yaitu:

- a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
- h. Informasi keuangan lainnya.

3. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan menurut *International Financial Reporting Standard (IFRS)* meliputi :

- a. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan berisi jumlah aset (*Asset*), liabilitas (*Liabilities*), dan ekuitas (*Equity*).

b. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Laporan laba rugi komprehensif melaporkan pendapatan operasional dan pendapatan non operasional, beban operasional dan beban non operasional, laba ditahan, laba atau rugi.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas berisi laporan tentang ekuitas yang disetorkan, laba ditahan, laba tahun berjalan maupun deviden.

d. Laporan Arus Kas

Mencangkup laporan arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar selama periode akuntansi.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Berisi catatan-catatan yang tidak terdapat pada laporan keuangan atau penjelasan secara lengkap tentang laporan keuangan tersebut.

4. Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pada Rumah Sakit

Komponen Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD Pemerintah Daerah dan BLUD yang disajikan terdiri dari :

- a. Laporan Realiasi Anggaran (LRA).
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
- c. Neraca
- d. Laporan Arus Kas (LAK).
- e. Laporan Operasional.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

C. Analisis Rasio Laporan Keuangan

1. Pengertian Analisis Rasio

Analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.

2. Tujuan Analisis Rasio

Kelemahan finansial rumah sakit dan mengukur tingkat efisiensi selama periode waktu berjalan dapat terlihat. Kelemahan yang terdapat di rumah sakit dapat segera diperbaiki, sedangkan hasil yang cukup baik harus dipertahankan pada waktu mendatang. Analisis historis tertentu dapat digunakan untuk penyusunan rencana dan kebijakan dimasa mendatang (Johar, 2006).

3. Manfaat Analisis Rasio

Manfaat analisis rasio keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Analisis rasio keuangan membantu manajer keuangan memahami apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan berdasarkan informasi yang tersedia, yang sifatnya berasal dari laporan keuangan.
- b. Analisis rasio pada dasarnya tidak hanya berguna bagi pihak intern perusahaan melainkan juga berguna bagi pihak calon investor atau kreditor yang akan menanamkan modal dengan cara membeli saham perusahaan.
- c. Analisis rasio membantu manajer perusahaan dengan cara menghitung rasio-rasio tertentu akan memperoleh informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh perusahaan di bidang keuangan, sehingga

dapat membuat keputusan-keputusan yang penting bagi perusahaan untuk masa yang akan datang.

- d. Analisis rasio memberi informasi kepada investor atau calon pembeli saham untuk dijadikan bahan pertimbangan membeli saham sebuah perusahaan.

4. Keterbatasan Analisis Rasio

Adapun keterbatasan analisis rasio menurut (Sawir, 2005):

- a. Kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang dianalisis perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang.
- b. Rasio disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi oleh cara penafsiran yang berbeda dan bahkan bisa merupakan hasil manipulasi.
- c. Perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang berbeda, misalnya perbedaan metode penyusutan atau metode penilaian persediaan. Informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya merupakan perkiraan.

D. Analisis Penilaian Kinerja Keuangan BLU Bidang Kesehatan

1. Analisis Rasio

a. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas digunakan untuk melihat perbandingan antara kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek.

Rumus :

$$\frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Kas adalah uang tunai atau saldo bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU.
- 2) Setara kas merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversikan menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Contoh setara kas antara lain deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang jatuh tempo kurang dari 3 bulan.
- 3) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

Skor Rasio Kas sebagai berikut :

Tabel 2.1 Daftar Skor Rasio Kas

Rasio Kas (%)	Skor
RK > 480	0,25
420 < RK ≤ 480	0,5
360 < RK ≤ 420	1
300 < RK ≤ 360	1,5
240 < RK ≤ 300	2
180 < RK ≤ 240	1,5
120 < RK ≤ 180	1
60 < RK ≤ 120	0,5
0 < RK ≤ 60	0,25
RK = 0	0

Contoh perhitungan :

BLU “A” mempunyai rasio kas sebesar 380%, maka skor untuk rasio kas BLU “A” adalah 1.

b. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar digunakan untuk melihat perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Rumus:

$$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:
 - a) Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.
 - b) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
 - c) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
- 2) Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar dimuka.
- 3) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

Skor Rasio Lancar adalah:

Tabel 2.2 Daftar Skor Rasio Lancar

Rasio Lancar(%)	Skor
$RL > 600$	2,5
$480 < RL \leq 600$	2
$360 < RL \leq 480$	1,5
$240 < RL \leq 360$	1
$120 < RL \leq 240$	0,5
$0 < RL \leq 120$	0,25
$RL = 0$	0

Contoh perhitungan:

BLU “A” mempunyai rasio lancar sebesar 482%, maka skor untuk rasio lancar BLU “A” adalah 2.

c. Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*)

Periode penagihan piutang digunakan untuk melihat perbandingan antara piutang usaha dengan pendapatan usaha dalam satu tahun.

Rumus:

$$\frac{\text{Piutang Usaha} \times 360}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 1 \text{ Hari}$$

Pendapatan Usaha

Penjelasan:

- 1) Piutang usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLU.
- 2) Pendapatan usaha merupakan PNBPN BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Skor periode penagihan piutang adalah:

Tabel 2.3 Daftar Skor Rasio Periode Penagihan Piutang

Periode Penagihan Piutang	Skor
PPP < 30	2
30 ≤ PPP < 40	1,5
40 ≤ PPP < 60	1
60 ≤ PPP < 80	0,5
80 ≤ PPP < 100	0,25
PPP ≥ 100	0

Contoh perhitungan:

BLU “A” mempunyai periode penagihan piutang 25 hari, maka skor untuk rasio periode penagihan piutang BLU “A” adalah 2.

d. Perputaran Aset Tetap (*Fixed Aset Turnover*)

Perputaran aset tetap digunakan untuk melihat perbandingan antara pendapatan operasional dengan aset tetap.

Rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Pendapatan operasional merupakan PNBP BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN dan hibah.
- 2) Aset tetap adalah nilai perolehan aset tetap tanpa memperhitungkan konstruksi dalam pengerjaan.

Skor rasio perputaran aset tetap adalah:

Tabel 2.4 Daftar Skor Rasio Perputaran Aset Tetap

Perputaran Aset Tetap	Skor
PAT > 20	2
15 < PAT ≤ 20	1,5
10 < PAT ≤ 15	1
5 < PAT ≤ 10	0,5
0 < PAT ≤ 5	0,25
PAT = 0	0

Contoh perhitungan:

BLU “A” mempunyai rasio perputaran aset tetap 22%, maka skor untuk rasio perputaran aset BLU “A” adalah 2.

e. Imbalan atas Aset Tetap (*Return on Fixed Asset*)

Imbalan atas Aset Tetap untuk melihat perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keungan/kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan, dengan nilai perolehan aset tetap tidak termasuk konstruksi dalam pengerjaan.

Rumus:

$$\frac{\text{Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian adalah surplus/defisit sebelum pos keuntungan/ kerugian, tanpa memperhitungkan

pendapatan investasi yang bersumber dari APBN dan biaya penyusutan.

- 2) Aset tetap adalah nilai perolehan aset tetap tanpa memperhitungkan konstruksi dalam pengerjaan.

Skor rasio imbalan aset tetap adalah:

Tabel 2.5 Daftar Skor Rasio Imbalan Atas Aset Tetap

Imbalan Atas Aset Tetap (%)	Skor
$ROFA > 6$	2
$5 < ROFA \leq 6$	1,7
$4 < ROFA \leq 5$	1,4
$3 < ROFA \leq 4$	1,1
$2 < ROFA \leq 3$	0,8
$1 < ROFA \leq 2$	0,5
$0 \leq ROFA \leq 1$	0

Contoh perhitungan:

BLU "A" mempunyai rasio imbalan atas aset tetap 5,5%, maka skor untuk rasio imbalan atas aset tetap BLU "A" adalah 1,7.

f. Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*)

Imbalan ekuitas digunakan untuk melihat perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan, dengan ekuitas setelah dikurangi surplus/defisit tahun berjalan.

Rumus:

$$\frac{\text{Surplus atau Defisit}}{\text{Ekuitas - Surplus atau Defisit}} \times 100\%$$

sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian

Penjelasan:

- 1) Surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian adalah surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tanpa memperhitungkan pendapatan investasi yang bersumber dari APBN dan biaya penyusutan.
- 2) Ekuitas adalah selisih antara hak residual BLU atas aset dengan seluruh kewajiban yang dimiliki.

Skor rasio imbalan ekuitas adalah:

Tabel 2.6 Daftar Skor Rasio Imbalan Ekuitas

Imbalan Ekuitas (%)	Skor
ROE > 8	2
7 < ROE ≤ 8	1,8
6 < ROE ≤ 7	1,6
5 < ROE ≤ 6	1,4
4 < ROE ≤ 5	1,2
3 < ROE ≤ 4	1
2 < ROE ≤ 3	0,8
1 < ROE ≤ 2	0,6
0 < ROE ≤ 1	0,4
ROE = 0	0

Contoh perhitungan:

BLU “A” mempunyai rasio imbalan ekuitas sebesar 6,5%, maka skor untuk rasio imbalan ekuitas BLU “A” adalah 1,6.

g. Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover*)

Perputaran persediaan digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah total persediaan dengan pendapatan usaha.

Rumus:

$$\frac{\text{Total Persediaan} \times 365}{\text{Pendapatan BLU}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- a) Total persediaan adalah seluruh barang persediaan yang dimiliki oleh rumah sakit sebagaimana diatur dalam PSAP No.05 Paragraf 05.
- b) Pendapatan BLU merupakan pendapatan Satker BLU yang terdiri dari atas pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, termasuk pendapatan yang berasal dari APBN.

Skor rasio perputaran persediaan adalah:

Tabel 2.7 Daftar Skor Rasio Perputaran Persediaan

Perputaran Persediaan (Hari)	Skor
PP > 35	2
30 < PP ≤ 35	1,75
25 < PP ≤ 30	1,5
20 < PP ≤ 25	1,25
15 < PP ≤ 20	1
10 < PP ≤ 15	0,75
5 < PP ≤ 10	0,5
1 < PP ≤ 5	0,25
0 < PP ≤ 1	0

Contoh perhitungan:

BLU “A” mempunyai rasio perputaran persediaan 23 hari, maka skor untuk rasio perputaran persediaan BLU “A” adalah 1,25.

h. Rasio pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional

Rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional digunakan untuk melihat perbandingan antara penerimaan PNBPN dengan biaya operasional.

Rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan PNBPN}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Pendapatan PNBPN merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, termasuk pendapatan yang berasal dari APBN.
- 2) Biaya Operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBPN Satker BLU.

Skor Rasio pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional:

Tabel 2.8 Daftar Skor Rasio Pendapatan PNBPN Terhadap Biaya Operasional

Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional (%)	Skor
$PB > 65$	2,5
$57 < PB \leq 65$	2,25
$50 < PB \leq 57$	2
$42 < PB \leq 50$	1,75
$35 < PB \leq 42$	1,5
$28 < PB \leq 35$	1,25
$20 < PB \leq 28$	1
$12 < PB \leq 20$	0,75
$4 < PB \leq 12$	0,5
$0 < PB \leq 4$	0

Contoh perhitungan:

BLU “A” mempunyai rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional sebesar 62%, maka skor untuk rasio kas BLU “A” adalah 2,25.

i. Rasio Subsidi Biaya Pasien

Rasio subsidi biaya pasien digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah subsidi biaya pasien dengan pendapatan BLU.

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Subsidi Biaya Pasien}}{\text{Pendapatan BLU}} \times 100\%$$

Penejelasan:

- a) Jumlah subsidi biaya pasien adalah selisih biaya perawatan yang dikeluarkan rumah sakit dengan tarif jaminan, pemberian keringan kepada kepada pasien tidak mampu, termasuk kegiatan bakti sosial rumah sakit (CSR). Jumlah subsidi dimaksud diperhitungkan dalam periode satu tahun.
- b) Pendapatan BLU merupakan pendapatan Satker BLU yang terdiri dari atas pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, termasuk pendapatan yang berasal dari APBN.

Skor Rasio Subsidi Biaya Pasien adalah:

Tabel 2.9 Daftar Skor Rasio Subsidi Biaya Pasien

Rasio Subsidi Biaya Pasien (%)	Skor
$SBP \leq 1$	0
$1 < PP \leq 3$	0,5
$3 < PP \leq 5$	1
$5 < PP \leq 10$	1,5
$10 < PP \leq 15$	2
$15 < PP \leq 18$	1,5
$18 < PP \leq 20$	1
$SBP > 20$	0,5

Contoh perhitungan:

BLU "A" mempunyai rasio subsidi biaya pasien sebesar 7%, maka skor untuk rasio dimaksud adalah 1,5.

2. Analisis Indikator Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif

1) Jadwal Penyusutan

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005, setelah terbit Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, RBA dilakukan penyesuaian menjadi RBA Definitif yang ditandatangani menteri/pimpinan lembaga. RBA Definitif harus ditandatangani menteri/pimpinan lembaga paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Adapun penilaian ditentukan dari jangka waktu ditandatanganinya RBA Definitif sebagaimana skor tabel berikut:

Tabel 2.10 Daftar Skor RBA Ditandatangani

Jangka Waktu RBA Definitif Ditandatangani Menteri/Pimpinan Lembaga		Skor
1.	Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.	0,4
2.	Setelah tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.	0

2) Kelengkapan

Sesuai ketentuan PMK Nomor 92/PMK.05/2011, RBA Definitif disusun dengan ketentuan:

- a) Ditandatangani oleh pimpinan Satker BLU.
- b) Diketahui oleh dewan pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga jika Satker BLU tidak mempunyai dewan pengawas.
- c) Disetujui dan ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga; dan
- d) Format sesuai dengan PMK No. 92/PMK.05/2011.

Skor untuk kelengkapan RBA adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11 Daftar Skor Indikator Kelengkapan RBA

Kelengkapan	Skor	
	Ya	Tidak
1. Ditandatangani oleh pemimpin Satker BLU.	0,4	0
2. Diketahui oleh dewan pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga jika Satker BLU tidak mempunyai dewan pengawas.	0,4	0
3. Disetujui dan ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga.	0,4	0
4. Kesesuaian format dengan PMK No.92/PMK.05/2011	0,4	0

b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 dan PMK Nomor 76/PMK.05/2008, Satker BLU diwajibkan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan diaudit oleh auditor eksternal, serta menyampaikannya ke Direktorat Pembinaan PK BLU dengan jadwal sebagai berikut:

1) Triwulan I

Paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir

2) Semester I

Paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir

3) Triwulan III

Paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir.

4) Tahunan

Paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir..

5) Audit Laporan Keuangan oleh auditor eksternal paling lambat tanggal

31 Mei tahun anggaran berikutnya.

6) Opini audit Laporan Keuangan

Skor untuk waktu penyampaiannya dan audit Laporan Keuangan adalah berikut:

Tabel 2.12 Daftar Skor Waktu Penyampaiannya dan Audit Laporan Keuangan

No	Jenis Laporan	Waktu Penyampaian	Skor
1	Laporan Keuangan Triwulan I	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 15	0,2
		2. Terlambat s.d 30 hari	0,15
		3. Terlambat lebih dari 30 hari.	0,1
2	Laporan Keuangan Semester I	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 10.	0,2
		2. Terlambat s.d 30 hari	0,15
		3. Terlambat lebih dari 30 hari	0,1
3	Laporan Keuangan Triwulan III	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 15	0,2
		2. Terlambat s.d 30 hari	0,15
		3. Terlambat lebih dari 30 hari	0,1
4	Laporan Keuangan Tahunan	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 20	0,2
		2. Terlambat s.d 30 hari	0,15
		3. Terlambat lebih dari 30 hari	0,1
5	Audit Laporan Keuangan Tahunan	1. Diaudit oleh auditor eksternal s.d tanggal 31 Mei TA berikutnya.	0,2
		2. Diaudit oleh auditor eksternal setelah tanggal 31 Mei TA berikutnya	0,15
		3. Tidak diaudit	0,1

Skor untuk audit Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Daftar Skor Audit Laporan Keuangan

Hasil Audit Laporan Keuangan	Skor
Wajar tanpa pengecualian (<i>unqualified</i>)	1
Wajar dengan pengecualian (<i>qualified</i>)	0,5
Tidak berpendapat (<i>disclaimer</i>)	0,25
Tidak wajar (<i>adverse</i>)	0,15
Belum/tidak diaudit (<i>unaudited</i>)	0,1

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

Sesuai ketentuan PER-30/PB/2011, Satker BLU mengajukan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU (SP3B BLU) ke KPPN minimal satu kali dalam satu triwulan, yaitu paling lambat disampaikan ada akhir triwulan berkenan.

SP3B BLU disamping memuat pendapatan dan belanja, juga membuat jumlah saldo awal kas yang telah sesuai dengan saldo akhir kas triwulan sebelumnya.

Skor untuk waktu penyampaian dan kebenaran saldo kas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Daftar Skor Waktu Penyampaian dan Kebenaran Saldo Kas

Jenis SPM	Waktu penyampaian dan Kebenaran Saldo Kas	Skor
SP3B BLU Triwulan I	1. Disampaikan sampai dengan akhir triwulan I	0,2
	2. Disampaikan setelah triwulan I	0
	3. Saldo kas telah sesuai	0,2
SP3B BLU Triwulan II	1. Disampaikan sampai dengan akhir triwulan II	0,2
	2. Disampaikan setelah triwulan II	0
	3. Saldo kas telah sesuai	0,2
SP3B BLU Triwulan III	1. Disampaikan sampai dengan akhir triwulan III	0,2
	2. Disampaikan setelah triwulan III	0
	3. Saldo kas telah sesuai	0,2
SP3B BLU Triwulan IV	1. Sampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran.	0,4
	2. Masih terdapat pendapatan dan belanja yang belum dilakukan pengesahan	0
	3. Saldo kas telah sesuai	0,4

d. Tarif Layanan

PP Nomor 23 Tahun 2005, Satker BLU harus memiliki tarif layanan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau didelegasikan kepada menteri/pimpinan lembaga/pemimpinan Satker BLU sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif layanan Satker BLU berkenaan.

Skor untuk tarif layanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15 Daftar Skor Tarif Layanan

Tahap Pengusulan	Skor
1. Apabila tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.	1
2. Apabila tarif masih dalam proses penilaian di Kementerian Keuangan	0,75
3. Apabila tarif belum diusulkan ke Menteri Keuangan, namun menggunakan tarif berdasarkan PP	0,5
4. Apabila tarif belum diusulkan ke Menteri Keuangan, namun menggunakan tarif yang ditetapkan menteri/pimpinan lembaga.	0,25
5. Apabila tarif belum diusulkan ke Menteri Keuangan, namun menggunakan tarif yang ditetapkan pimpinan Satker BLU.	0

e. Sistem Akuntansi

PP Nomor 23 Tahun 2005 dan PMK Nomor 76/PMK.05/2008, Satker BLU diwajibkan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi, yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Akuntansi Biaya, dan Sistem Akuntansi Aset Tetap.

Skor untuk sistem akuntansi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16 Daftar Skor Sistem Akuntansi

Sistem Akuntansi	Skor	
	Ya	Tidak
Sistem akuntansi keuangan	0,6	0
Sistem akuntansi biaya	0,2	0
Sistem akuntansi aset tetap	0,2	0

f. Persetujuan Rekening

PP Nomor 23 Tahun 2005 dan PMK Nomor 05/PMK.05/2010, Satker BLU dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara.

Rekening lainnya dimaksud terdiri dari Rekening Pengelolaan Kas BLU, Rekening Operasional BLU dan Rekening Dana Kelolaan.

Skor untuk persetujuan rekening adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17 Daftar Skor Persetujuan Rekening

Persetujuan Rekening dari Kuasa BLU Pusat	Skor	
	Ya	Tidak
Rekening Pengelolaan Kas	0,1	0
Rekening Operasional	0,3	0
Rekening Dana Kelolaan	0,1	0

g. SOP Pengelolaan Kas

PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 16, Satker BLU melaksanakan pengelolaan kas berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas oleh Satker BLU, maka pemimpin Satker BLU harus menetapkan SOP Pengelolaan kas.

Skor untuk penyusunan SOP Pengelolaan Kas adalah:

Tabel 2.18 Daftar Skor SOP Pengelolaan Kas

SOP Pengelolaan Kas (ditetapkan Pemimpin Satker BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Kas	0,5	0

h. SOP Pengelolaan Piutang

PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 17, Satker BLU melaksanakan pengelolaan piutang berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang oleh Satker BLU, maka pemimpinan Satker BLU harus menetapkan SOP Pengelolaan Piutang.

Skor untuk penyusunan SOP Pengelolaan Piutang adalah:

Tabel 2.19 Daftar Skor SOP Pengelolaan Piutang

SOP Pengelolaan Piutang (ditetapkan Pemimpinan Satker BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Piutang	0,5	0

i. SOP Pengelolaan Utang

PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 18, Satker BLU melaksanakan pengelolaan utang berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang oleh Satker BLU, maka pemimpinan Satker BLU harus menetapkan SOP Pengelolaan Utang.

Skor untuk penyusunan SOP Pengelolaan Utang adalah:

Tabel 2.20 Skor SOP Pengelolaan Utang

SOP Pengelolaan Utang (ditetapkan Pemimpinan Satker BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Utang	0,5	0

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa

PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 20, Satker BLU melaksanakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa oleh Satker BLU, maka pemimpinan Satker BLU harus menetapkan SOP Pengadaan Barang dan Jasa.

Skor untuk penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa adalah:

Tabel 2.21 Skor SOP Pengadaan Barang dan Jasa

SOP Pengadaan Barang dan Jasa (ditetapkan Pemimpin Satker BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,5	0

k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris

PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 21, Satker BLU melaksanakan pengelolaan barang investasi berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang investasi oleh Satker BLU, maka pemimpin Satker BLU harus menetapkan SOP Pengelolaan Barang Investasi.

Skor untuk penyusunan SOP Pengelolaan Barang Investasi adalah:

Tabel 2.22 Skor SOP Pengelolaan Barang Investasi

SOP Pengelolaan Barang Investasi (ditetapkan Pemimpin Satker BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Barang Investasi	0,5	0

3. Rincian Skor Penilaian Kinerja Keuangan BLU

Tabel 2.23 Skor Penilaian Kinerja Keuangan BLU

No	Subaspek / Indikator	Skor
1	Rasio Keuangan	19
	a. Rasio kas	2
	b. Rasio Lancar	2,5
	c. Periode Penagihan Piutang	2
	d. Perputaran Aset Tetap	2
	e. Imbalan Atas Aset Tetap	2
	f. Imbalan Ekuitas	2
	g. Perputaran Persediaan	2
	h. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	2,5
	i. Rasio Subsidi Biaya Pasien	2
2	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	11
	a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	2
	b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan	2
	c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	2
	d. Tarif Layanan	1
	e. Sistem Akuntansi	1
	f. Persetujuan Rekening	0,5
	g. SOP Pengelolaan Kas	0,5
	h. SOP Pengelolaan Piutang	0,5
	i. SOP Pengelolaan Utang	0,5
	j. SOP Pengelolaan Barang dan Jasa	0,5
	k. SOP Pengelolaan Barang Investasi	0,5
	JUMLAH ASPEK KEUANGAN (1+2)	30